

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

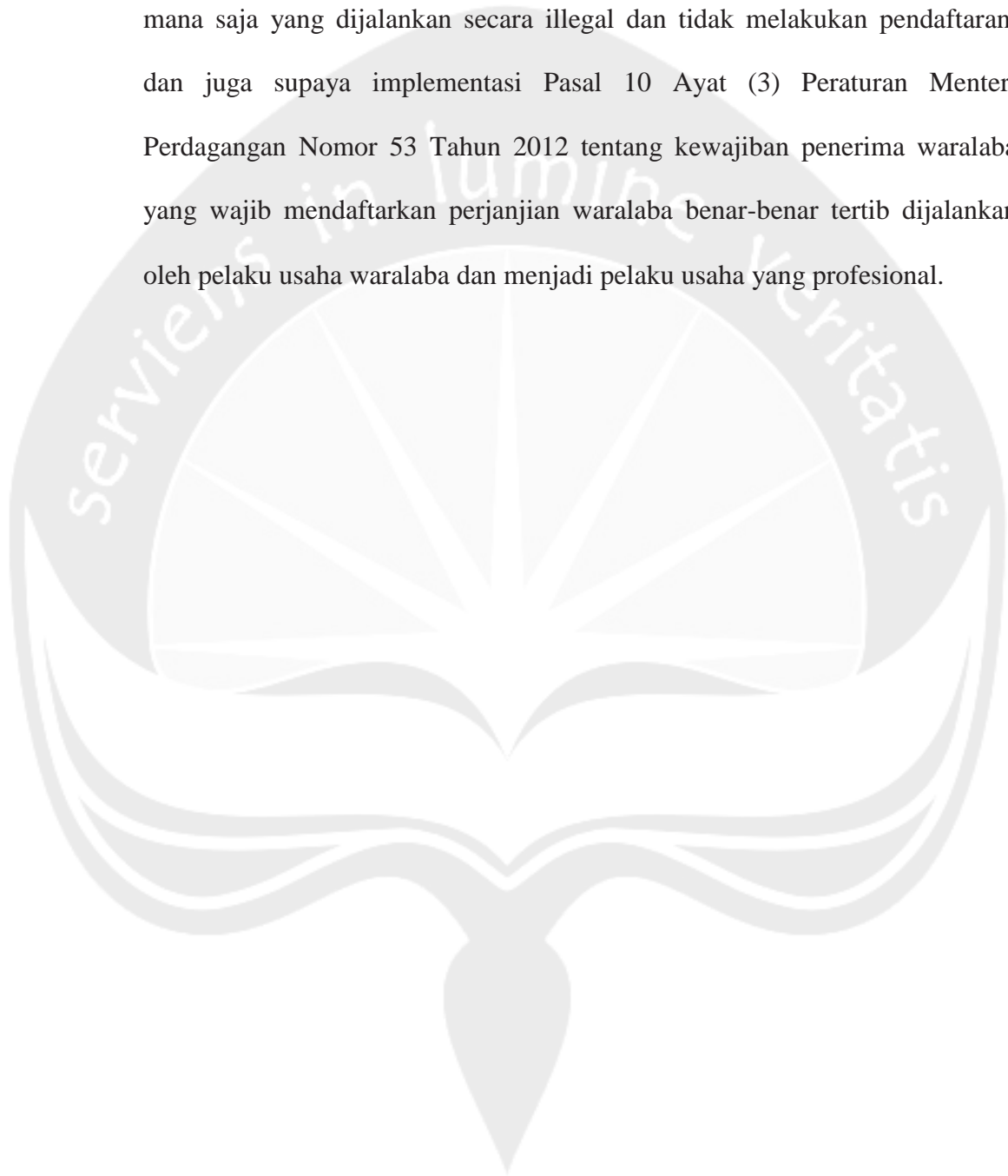
Berdasarkan paparan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang kewajiban penerima waralaba yang wajib mendaftarkan perjanjian waralabanya dilihat dari kondisi pelaku usaha waralaba di lapangan masih terdapat pelaku usaha yang tidak mendaftarkan perjanjian waralabanya dan dapat dilihat bahwa pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha waralaba belum menjangkau seluruh pelaku usaha waralaba khususnya penerima waralaba dalam skala menengah ke bawah, sehingga melihat ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan perjanjian waralabanya sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 yaitu pengenaan sanksi berupa sejumlah denda bagi pelanggar atau pelaku usaha waralaba yang tidak mendaftarkan perjanjian waralabanya juga tidak dilakukan oleh Pemerintah.

##### **B. Saran**

Diharapkan agar Pemerintah Daerah dalam menjalankan pengawasan terhadap usaha waralaba dapat lebih disiplin dan rutin dalam melakukan

pengawasan di lapangan sehingga dapat diketahui dengan jelas usaha-usaha mana saja yang dijalankan secara ilegal dan tidak melakukan pendaftaran, dan juga supaya implementasi Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang kewajiban penerima waralaba yang wajib mendaftarkan perjanjian waralaba benar-benar tertib dijalankan oleh pelaku usaha waralaba dan menjadi pelaku usaha yang profesional.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan-Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Gunawan Widjaya, (2002), *Lisensi Atau Waralaba-Suatu Panduan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineke Cipta.

Richard Hammond, 2003, *Sukses Berbisnis Ritel-Bagaimana Mengubah Toko Anda Menjadi Sebuah Fenomena Penjualan*, Erlangga, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku-Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.

Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.

Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Sugito Hadi, 2000, *Taktik Sukses Untuk Bisnis-Panduan bagi Usahawan dan Manajer*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konsultan Hukum SKHPI, Yogyakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian-Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, Prenada Media.

### **Website**

<http://www.marketing.co.id/ini-dia-jurus-es-teler-77-menarik-minat-investor/>

<http://www.pengusaha.co/thread-104-definisi-waralaba-atau-franchise.html>

[http://www.ekonomi-holic.com/2012/10/pengertian-jenis-dan-sejarah-bisnis\\_20.html](http://www.ekonomi-holic.com/2012/10/pengertian-jenis-dan-sejarah-bisnis_20.html)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b704502ff92/plus-minus-kerja-sama-bagi-hasil-dan-waralaba>

[http://www.waralabaku.com/pedia\\_index.php](http://www.waralabaku.com/pedia_index.php)

<http://membangunusaha.wordpress.com/2010/06/15/147/>

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>

<http://www.legalakses.com/perjanjian-waralaba>

<http://bisnisfranchiseindonesia.com/blog/sejarah-bisnis-waralaba-di-indonesia/>

### **Ensiklopedi, Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

### **Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Darsana, SH. , Yogyakarta, 21 November 2014.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas

Perindagkop dan UKM DIY, Eko Witoyo, SH., Yogyakarta, 6 November 2014.

